

STUDI KOMPARATIF KERAGAAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA SWADAYA RSPO DAN NON-RSPO DI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN

COMPARATIVE ANALYSIS OF RSPO AND NON-RSPO INDEPENDENT SMALLHOLDERS PERFORMANCE IN UKUI DISTRICT PELALAWAN REGENCY

Fitriani¹, Sakti Hutabarat², Jumatri Yusri²
Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau
Jalan HR. Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293
Fitrianiagb010@gmail.com: +6285272773851

ABSTRACT

Oil palm produces vegetable oil used in various products including food, non-food, and biodiesel. Increasing demand for crude palm oil has provoked demand for fresh fruit bunches. The oil palm growers respond the higher demand by development of new planting. Land expansion become an important issue since it creates not only positive impacts but also negative impacts such as deforestation, biodiversity loss, forest fire and land conflicts. RSPO certification was established to mitigate the negative impacts and to promote sustainable production of palm oil. The growers must comply the Principles and Criteria of RSPO. Independent smallholders are the most susceptible growers to be included in the oil palm supply chain. How does the farmers manage their plantation to meet the standard while they face various barriers to run their business? The aims of this study are to analyse smallholders' performance, to assess the application of RSPO Principles and Criteria, and to compare productivity and farm income of oil palm plantations between the RSPO and non-certified independent smallholders. A survey method is used to collect data from the selected samples, 78 of RSPO-certified and 59 of Non-certified smallholders. Using quantitative and qualitative analyses, the result shows that the RSPO-certified smallholders have a very good performance and applied all the RSPO standard. The non-certified smallholders have a good performance and they are in the process of certification to meet the criteria. There are no significant differences in productivity and farm income between the two models. The RSPO-certified and non-certified smallholders located in the same area, therefore, most of the non-certified smallholders have seen the best practices and start applying some of the best practices by themselves.

Keywords: Certification, independent smallholders, productivity, farm income

PENDAHULUAN

Kelapa sawit adalah komoditi perkebunan yang menghasilkan minyak nabati dan memiliki peran penting bagi perindustrian dan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Provinsi Riau adalah provinsi dengan luas areal kelapa sawit terluas di Indonesia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau

pada tahun 2011 mencapai 2.258.553 ha dengan produksi sebesar 7.047.221 ton (Disbun Riau, 2012).

Produksi minyak kelapa sawit memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengatasinya berbagai lembaga internasional berupaya mendorong adanya sertifikasi kelapa sawit, salah satunya

¹. Mahasiswa Jurusan Agribisnis Faperta UR

². Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Faperta UR

yaitu *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* yang mendukung agar petani memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Petani swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah yang terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan telah memperoleh sertifikasi RSPO pada tanggal 29 Juli 2013. Petani swadaya ini menjadi yang pertama di Indonesia dan kedua di dunia yang menerima sertifikat RSPO (Widjojo, 2013).

Petani rakyat pola swadaya di Provinsi Riau yang mempunyai lahan kebun skala kecil belum mampu mendapatkan produksi yang maksimal. Peningkatan produksi tanpa merusak lingkungan dapat dilakukan dengan penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Best Management Practice (BMP)* pada kebun kelapa sawit. Namun, upaya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit sementara akses petani terhadap informasi, faktor produksi, pendanaan, dan pemasaran sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keragaan kebun petani swadaya RSPO dan non-RSPO, mengetahui tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO pada petani serta membandingkan produktivitas kebun dan pendapatan usahatani antara petani swadaya RSPO dan non-RSPO.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Ukui adalah kecamatan yang rata-rata penduduknya melakukan

usahatani kelapa sawit dan terdapat petani kelapa sawit swadaya bersertifikasi RSPO yang tergabung dalam Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Agustus 2014.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari reponden. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan melalui kuisisioner yang disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Kuisisioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengarahkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Data primer yang dibutuhkan mencakup identitas reponden yang mencakup umur, mata pencaharian, jumlah tanggungan keluarga dan tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, cara budidaya, pendapatan (pendapatan usahatani kelapa sawit dan pendapatan usahatani lain dan pendapatan non usahatani), data produksi dan harga dan jumlah faktor produksi. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait meliputi letak geografis daerah penelitian, kependudukan, jumlah petani di daerah penelitian.

Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode survey. Penentuan sampel dipilih secara *Simple Random Sampling*. Teknik penentuan jumlah sampel yang digunakan adalah teknik *solvin*. Jumlah populasi petani swadaya RSPO adalah 349 petani dan petani swadaya non-RSPO 142 petani. Berdasarkan teknik *solvin* didapatkan sampel untuk petani swadaya RSPO sebanyak 78 sampel

dan petani swadaya non-RSPO sebanyak 59 sampel.

Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini ada tiga analisis. Analisis pertama untuk mengetahui keragaan kebun petani swadaya RSPO dan non-RSPO digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif menyajikan kondisi aktual pada pengelolaan kebun petani dibandingkan dengan prinsip praktek budidaya terbaik berdasarkan teori budidaya kelapa sawit dari beberapa literatur.

Analisis kedua yaitu penilaian terhadap tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani yang dilakukan dengan skala guttman yang dimodifikasi dengan pemberian skor pada setiap jawaban responden. Skor jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor untuk setiap jawaban responden

No.	Kategori skor	Skor
1	Sangat Baik	5
2	Baik	4
3	Cukup Baik	3
4	Kurang Baik	2
5	Tidak baik	1

Cara menghitung skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO dengan rumus (Nazir, 2014):

$$\text{Besarnya kisaran (range)} = \frac{\text{skor maksimum} - \text{skor minimum}}{\text{jumlah kategori}} - 0,01$$

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk petani swadaya RSPO dan non-RSPO yaitu: jumlah responden RSPO (78) dan non-RSPO (59), jumlah pertanyaan (35), skor tertinggi (5), skor terendah (1), maka perhitungan skor tingkat

penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk setiap kriteria adalah:

Skor maksimum = 5

Skor minimum = 1

$$\text{range} = [(5 - 1)/5] - 0,01 = 0.79$$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk setiap kriteria adalah:

1. Sangat baik : 4,20 – 5,00
2. Baik : 3,40 – 4,19
3. Cukup baik : 2,60 – 3,39
4. Kurang baik : 1,80 – 2,59
5. Tidak baik : 1,00 – 1,79

Skor rata-rata sampel untuk setiap kriteria dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X}_q = \frac{\sum_{s=1}^n X_{qs}}{n}$$

dimana:

\bar{X}_q = skor rata-rata sampel untuk kriteria ke-q

X_{qs} = skor setiap sampel (s) untuk kriteria ke-q

n = jumlah sampel

Perhitungan skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO terhadap seluruh kriteria adalah:

Skor maksimum = $35 \times 5 = 175$

Skor minimum = $35 \times 1 = 35$

$$\text{Range} = [(175-35)/5]-0,01 = 27,99$$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk setiap petani terhadap seluruh kriteria adalah:

1. Sangat baik : 147,00 – 175,00
2. Baik : 119,00 – 146,99
3. Cukup baik : 91,00 – 118,99
4. Kurang baik : 63,00 – 90,99
5. Tidak baik : 35,00 – 62,99

Perhitungan skor rata-rata sampel untuk seluruh kriteria adalah:

$$\bar{X} = \sum_{q=1}^r \left[\frac{\sum_{s=1}^n X_{qs}}{n} \right]$$

dimana:

\bar{X} = skor rata-rata sampel untuk seluruh kriteria (q)

X_{qs} = skor setiap sampel (s) untuk seluruh kriteria (q)

r = jumlah keseluruhan kriteria

n = jumlah sampel

Skor rata-rata sampel untuk setiap prinsip diukur dengan menjumlahkan skor setiap sampel untuk kriteria dalam prinsip tertentu dan dibagi dengan jumlah sampel. Rumus rata-rata sampel untuk suatu prinsip ke-p (X_p) digunakan rumus:

$$\bar{X}_p = \sum_{k=1}^r \left[\frac{\sum_{s=1}^n X_{ks}}{n} \right]$$

dimana:

\bar{X}_p = skor rata-rata sampel untuk kriteria dalam prinsip ke-p

X_{ks} = skor setiap sampel (s) untuk kriteria ($k_{1...r}$) dalam prinsip ke-p

r = jumlah kriteria dalam suatu prinsip

n = jumlah sampel

Perhitungan kisaran skor untuk setiap prinsip adalah sebagai berikut:

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip satu dengan jumlah pertanyaan (2), skor tertinggi (5), skor terendah (1) yaitu:

Skor maksimum = $2 \times 5 = 10$

Skor minimum = $2 \times 1 = 2$

range = $[(10 - 2)/5] - 0.01 = 1,59$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip satu terhadap seluruh kriteria adalah:

1. Sangat baik : 8,40 – 10,00
2. Baik : 6,80 – 8,39
3. Cukup baik : 5,20 – 6,79
4. Kurang baik : 3,60 – 5,19
5. Tidak baik : 2,00 – 3,59

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip dua dengan jumlah pertanyaan (3), skor tertinggi (5), skor terendah (1) yaitu:

Skor maksimum = $3 \times 5 = 15$

Skor minimum = $3 \times 1 = 3$

range = $[(15 - 3)/5] - 0.01 = 2,39$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip dua terhadap seluruh kriteria adalah:

1. Sangat baik : 12,60 – 15,00
2. Baik : 10,20 – 12,59
3. Cukup baik : 7,80 – 10,19
4. Kurang baik : 5,40 – 7,79
5. Tidak baik : 3,00 – 5,59

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip empat dengan jumlah pertanyaan (8), skor tertinggi (5), skor terendah (1) yaitu:

Skor maksimum = $8 \times 5 = 40$

Skor minimum = $8 \times 1 = 8$

range = $[(40 - 8)/5] - 0.01 = 6,39$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip empat terhadap seluruh kriteria adalah:

1. Sangat baik : 33,60 – 40,00
2. Baik : 27,20 – 33,59
3. Cukup baik : 20,80 - 27,19
4. Kurang baik : 14,40 – 20,79
5. Tidak baik : 8,00 – 14,39

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip lima dengan jumlah pertanyaan (4), skor tertinggi (5), skor terendah (1) yaitu:

Skor maksimum = $4 \times 5 = 20$

Skor minimum = $4 \times 1 = 4$
 $range = [(20 - 4)/5] - 0.01 = 3,19$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip lima terhadap seluruh kriteria adalah:

1. Sangat baik : 16,80 – 20,00
2. Baik : 13,60 – 16,79
3. Cukup baik : 10,40 – 13,59
4. Kurang baik : 7,20 – 10,30
5. Tidak baik : 4,00 – 7,19

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip enam dengan jumlah pertanyaan (10), skor tertinggi (5), skor terendah (1) yaitu:

Skor maksimum = $10 \times 5 = 50$
 Skor minimum = $10 \times 1 = 10$
 $range = [(50 - 10)/5] - 0.01 = 3,19$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip enam terhadap seluruh kriteria adalah:

1. Sangat baik : 42,00 – 50,00
2. Baik : 34,00 – 41,99
3. Cukup baik : 26,00 – 33,99
4. Kurang baik : 18,00 – 25,99
5. Tidak baik : 10,00 – 17,99

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip tujuh dengan jumlah pertanyaan (6), skor tertinggi (5), skor terendah (1) yaitu:

Skor maksimum = $6 \times 5 = 30$
 Skor minimum = $6 \times 1 = 6$
 $range = [(30 - 6)/5] - 0.01 = 4,79$

Berdasarkan kisaran maka kategori skor tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk prinsip tujuh terhadap seluruh kriteria adalah:

1. Sangat baik : 25,20 – 30,00
2. Baik : 20,40 – 25,19

3. Cukup baik : 15,60 – 20,39
4. Kurang baik : 10,80 – 15,59
5. Tidak baik : 6,00 – 10,79

Analisis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung produktivitas kelapa sawit per hektar per tahun.
2. Pendapatan usahatani dihitung dengan rumus (Shadbolt dan Sandra, 2005; Soekartawi, 1995):

$$TR = Q \times P$$

dimana :

TR = Total penerimaan (Rp)
 Q = Jumlah produksi yang dihasilkan (Kg)
 P = Price/harga (Rp)

$$\Pi = TR - VC - FC$$

dimana :

Π = Profit/keuntungan (Rp)
 R = Revenue/penerimaan (Rp)
 VC = Variabel cost/Biaya variabel (Rp)
 FC = Fixed cost/Biaya tetap (Rp)

$$I_{farm} = \Pi - \text{Biaya Faktor}$$

dimana :

I_{farm} = pendapatan bersih dari usahatani kelapa sawit (Rp)
 Biaya faktor = biaya bunga, biaya sewa dan pajak (Rp)

3. Membandingkan produktivitas dan pendapatan usahatani antara petani swadaya RSPO dan non-RSPO dengan pengujian secara statistik menggunakan pengujian hipotesis beda dua rata-rata sampel besar ($n > 30$) uji Z yang dianalisis menggunakan alat analisis SPSS. Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut (Hasan, 2012).

$$Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} \text{ dengan } S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

dimana:

n_1 = Jumlah petani swadaya RSPO

n_2 = Jumlah petani swadaya non-RSPO

\bar{X}_1 = Rata-rata produktivitas dan pendapatan usahatani kelapa sawit petani RSPO

\bar{X}_2 = Rata-rata produktivitas dan pendapatan usahatani kelapa sawit petani non-RSPO

S_1^2 = Varian rata-rata produktivitas kelapa sawit petani swadaya RSPO

S_2^2 = Varian rata-rata produktivitas kelapa sawit petani swadaya non-RSPO

Perumusan hipotesis:

1. H_0 di terima jika - $Z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq Z_{\alpha/2}$
2. H_0 di tolak jika $Z_0 > Z_{\alpha/2}$ atau $Z_0 < -Z_{\alpha/2}$

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. $H_0: X_R = X_{NR}$
 $H_a: X_R \neq X_{NR}$

Artinya: jika H_0 diterima maka produktivitas kelapa sawit petani swadaya RSPO sama dengan produktivitas kelapa sawit petani swadaya non-RSPO. Sebaliknya jika H_a diterima maka produktivitas kelapa sawit petani swadaya RSPO tidak sama atau berbeda nyata dengan produktivitas kelapa sawit petani swadaya non-RSPO.

2. $H_0: \Pi_R = \Pi_{NR}$
 $H_a: \Pi_R \neq \Pi_{NR}$

Artinya: jika H_0 diterima maka pendapatan petani swadaya RSPO sama dengan pendapatan petani

swadaya non-RSPO. Sebaliknya jika H_a diterima maka pendapatan petani swadaya RSPO tidak sama dengan pendapatan petani swadaya non-RSPO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah $\pm 1.392.494$ ha atau 14,73% dari luas wilayah Provinsi Riau. Jarak Kabupaten Pelalawan dengan Pusat Ibukota Provinsi Riau ± 68 km. Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatra antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' - 103,28' Bujur Timur. Kecamatan Ukui merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 1.087,42 Km² dengan tingkat kepadatan penduduk 26,4 jiwa/km².

Keragaan Petani

Rata-rata umur petani swadaya RSPO adalah 44,91. Petani swadaya RSPO paling banyak berada pada rentang umur 40-64 tahun yaitu sebanyak 54 orang dan petani paling sedikit berada pada rentang umur 15-39 tahun yaitu sebanyak 25 orang. Sedangkan rata-rata umur petani swadaya non-RSPO adalah 41,40. Petani petani swadaya non-RSPO paling banyak berada pada rentang umur 15-39 tahun yaitu sebanyak 31 orang dan petani paling sedikit berada pada umur di atas 65 tahun yaitu sebanyak satu orang. Dari data tersebut terlihat bahwa sebagian besar petani sawadaya RSPO dan non-RSPO berada pada umur produktif. Dengan demikian adopsi teknologi inovasi dapat dengan cepat diserap oleh petani.

Jumlah petani swadaya RSPO paling banyak adalah tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 46 orang dan jumlah petani swadaya RSPO paling sedikit adalah petani tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak satu orang. Sama halnya dengan petani swadaya RSPO, petani swadaya non-RSPO jumlah petani paling banyak berada pada tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 31 orang dan paling sedikit petani yang tidak sekolah yaitu sebanyak satu orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan petani swadaya RSPO dan petani swadaya non-RSPO masih rendah. Oleh karena itu, berbagai penyuluhan dan pelatihan yang didapatkan petani melalui pelatihan-pelatihan tentang budidaya kelapa sawit berkelanjutan dapat membantu petani dalam melaksanakan kegiatan berusahatani dengan baik serta berkelanjutan.

Profil KUD Bakti

KUD Bakti berdiri pada tanggal 15 November tahun 2001 dengan badan hukum No: 39/BH/KDK/2.1/2002. Terbentuknya KUD Bakti dikarenakan adanya pemekaran wilayah Desa Bukit Jaya dengan berubahnya Dusun Trimulya (dusun III) menjadi Desa Trimulya Jaya pada tahun 2001. Anggota KUD Bakti adalah petani kelapa sawit plasma yang bertempat tinggal di Dusun Trimulya. Petani plasma terdiri dari 11 kelompok tani yang berjumlah 224 orang dan sebelumnya merupakan anggota KUD Bina Usaha Baru Desa Bukit Jaya.

Peranan KUD Bakti bagi petani swadaya adalah sebagai fasilitator untuk anggota petani swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah. Fasilitas yang diberikan oleh KUD Bakti

dalam hal ini yaitu penyediaan sarana produksi seperti pupuk yang dapat dibeli secara kredit dan pengangkutan TBS petani. Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah adalah tempat pemasaran TBS petani swadaya RSPO dan non-RSPO, yang bergabung sebagai anggota asosiasi sebelum TBS dipasarkan ke pembeli akhir (perusahaan mitra) yaitu PT Inti Indosawit Subur.

Profil Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah

Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah adalah kelompok petani swadaya pertama di Indonesia dan kedua di dunia setelah Thailand yang memperoleh sertifikat RSPO. Asosiasi Petani Sawit Amanah dibentuk pada tanggal 8 April 2012 yang terdiri dari 10 kelompok tani RSPO yang berjumlah 349 orang petani dengan luas areal 767,56 ha dan tujuh kelompok tani non-RSPO (calon anggota RSPO). Kelompok tani RSPO yang tergabung pada Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah berasal dari tujuh kelompok tani dari Desa Trimulya Jaya, dua kelompok dari Desa Bukit Jaya dan satu kelompok dari Desa Air Emas. Kelompok tani non-RSPO berasal dari tiga kelompok tani dari Desa Trimulya Jaya, tiga kelompok tani dari Desa Air Emas dan satu kelompok tani dari Desa Bukit Jaya. Pelatihan-pelatihan untuk petani dilakukan dalam rentang waktu 10 bulan. Petani mendapat pelatihan dan pemahaman tentang cara pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Petani mulai dikenalkan dengan praktik perkebunan yang baik seperti perawatan, pemakaian herbisida, pemupukan, pemanenan dan menjaga kawasan bernilai konservasi

tinggi atau *High Conservation Value* (HCV).

Profil PT. Inti Indosawit Subur

PT. Inti Indosawit Subur merupakan suatu perusahaan di bawah naungan Perusahaan Asian Agri Group yang berkembang pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit dengan produk utama CPO dan *Palm Kernel Oil* (PKO). Hubungan PT. Inti Indosawit Subur dengan Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah adalah perusahaan pembeli TSB petani (perusahaan mitra). Sebagai perusahaan mitra, PT. Inti Indosawit Subur menyediakan sarana produksi seperti pupuk untuk KUD Bakti dan Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah. Selain itu PT. Inti Indosawit Subur juga memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk petani kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah.

1. Perbandingan Keragaan Kebun Petani Swadaya RSPO dan Non-RSPO

Bibit

Bibit yang digunakan oleh petani swadaya RSPO dan non-RSPO adalah bibit dengan merk dagang Marihat. Kualitas bibit yang digunakan oleh petani swadaya RSPO dan non-RSPO tidak jauh berbeda. Menurut hasil observasi pada kebun petani swadaya RSPO banyak ditemukan bibit yang tidak unggul pada sampel buah sawit petani. Sama halnya dengan kebun petani swadaya non-RSPO banyak ditemukan bibit yang tidak unggul. Kelapa sawit pada kebun petani rata-rata ditanam pada tahun 2000, dimana pada tahun tersebut bibit yang tersedia adalah bibit Marihat.

Dengan keterbatasan pengetahuan petani mengenai bibit yang unggul dan susah nya akses petani untuk membeli bibit dalam skala kecil pada penangkar bibit yang bersertifikat, menyebabkan petani menggunakan bibit yang seadanya atau tidak dapat dipastikan kualitasnya.

Pemupukan

Pupuk yang tersedia terdapat dua pilihan yaitu paket A (100%) dan paket B (75%). Petani swadaya RSPO yang menggunakan paket A ada 40 petani dan petani yang menggunakan paket B ada 38 petani. Sedangkan petani swadaya RSPO rata-rata menggunakan pupuk paket B dengan alasan keterbatasan biaya untuk pembelian pupuk tersebut.

Dosis pupuk yang digunakan oleh petani swadaya RSPO dan non-RSPO didasarkan oleh hasil analisa daun yang dilakukan oleh Perusahaan Asian Agri. Dosis pupuk untuk paket A per ha per tahun yaitu ZA 550 kg, MOP 425 kg, RP 150 kg dan kiserit 200 kg. Dosis pupuk Paket B yaitu ZA 425 kg, MOP 325 kg, RP 150 kg, dan kiserit 150 kg. Standar dosis pupuk menurut PPKS yaitu ZA 330 Kg, MOP 264 kg, RP 264 kg dan kiserit 198 kg. Dosis pupuk yang digunakan berbeda dengan dosis pada standar, hal ini disebabkan karena faktor lahan yang digunakan dan hasil analisa daun. Kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman berbeda-beda tergantung pada tingkat kesuburan tanah, sehingga kebutuhan pupuk yang diperlukan akan berbeda. Selain itu pada analisa daun dapat memberikan informasi mengenai ketidakseimbangan unsur hara atau kandungan hara (di dalam jaringan daun).

Penyemprotan Gulma

Penyemprotan gulma yang dilakukan oleh petani swadaya RSPO dan non-RSPO berbeda. Pada petani swadaya RSPO penyemprotan gulma dilakukan oleh TUS dimana dosis herbisida yang digunakan berdasarkan hasil analisa daun. Sedangkan petani swadaya non-RSPO melakukan penyemprotan sendiri dengan menggunakan herbisida Gamoxon dan Round up dengan dosis 2,5 liter per hektarnya.

Penyemprotan yang baik dan berkelanjutan adalah tidak melakukan penyemprotan total pada kebun, yaitu penyemprotan tidak menggunakan herbisida yang berlebihan yang menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Dosis herbisida pada penyemprotan oleh TUS telah disesuaikan dengan kondisi dilapangan, sehingga penyemprotan herbisida pada kebun lebih aman dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Sedangkan penyemprotan yang dilakukan oleh petani swadaya RSPO dengan dosis yang tidak sesuai kebutuhan, sehingga dosis herbisida yang berlebihan dapat mengganggu kelestarian makhluk hidup disekitar kebun.

Pengendalian Hama Terpadu

Praktek pengendalian hama terpadu yang telah dilakukan oleh petani swadaya RSPO dan non-RSPO adalah penanaman bunga pukul delapan (*Turnera Subulata*) untuk pengendalian ulat api (*Setora Nitens*) disekitar kebun. Penanaman bunga pukul delapan pada kebun baik petani swadaya RSPO maupun non-RSPO belum terlaksana dengan baik, karena masih sedikit sekali bunga pukul delapan yang ditanam disekitar kebun. Selain penanaman bunga pukul delapan (*Turnera*

Subulata) pengendalian hama terpadu petani juga dapat memelihara burung hantu (*Tyto alba*) yang dapat mengendalikan hama tikus, namun ini belum terealisasi. Selain itu petani juga harus melakukan pengamatan pada lingkungan kebun dan melakukan sensus hama dan penyakit secara rutin di kebun kelapa sawitnya. Pengamatan dapat bermanfaat untuk mengambil tindakan pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit.

Pemanenan

Panen TBS pada petani swadaya RSPO dan non-RSPO dilaksanakan tiga kali rotasi selama satu bulan atau 10 hari sekali. Rata-rata panen dalam satu rotasi pada kebun petani swadaya RSPO adalah 497,58 kg per ha. Sedangkan pada kebun petani swadaya non-RSPO rata-rata panen dalam satu rotasi adalah 472,02 kg per ha.

Prioritas TBS petani di PMKS yaitu prioritas pertama adalah untuk kebun inti, prioritas kedua untuk petani plasma dan petani swadaya RSPO, dan yang ketiga untuk petani swadaya non-RSPO. TBS di kebun petani swadaya RSPO langsung diangkut ke PMKS tiga sampai empat jam setelah dipanen. Namun berbeda dengan TBS petani swadaya non-RSPO, karena keterbatasan transportasi dan PMKS TBS petani swadaya RSPO tidak bisa secepatnya diangkut ke PMKS. Sehingga TBS diangkut setelah lebih dari delapan jam dan menyebabkan kualitas minyak yang dihasilkan menjadi rendah.

2. Tingkat Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO petani swadaya

Penerapan prinsip dan kriteria RSPO untuk petani swadaya RSPO

dikategorikan pada kriteria sangat baik yang ditunjukkan oleh rata-rata skor total sebesar 151 atau 86,20%. Sedangkan rata-rata total skor petani swadaya non-RSPO sebesar 112 atau 64,02% yang dikategorikan pada kriteria cukup baik.

Penerapan prinsip satu petani untuk swadaya RSPO adalah sangat baik yaitu dengan skor 8,88 atau 88,85% dan petani swadaya non-RSPO kurang baik dengan skor sebesar 4,71 atau 47,21%. Penerapan prinsip 2 skor untuk petani swadaya RSPO adalah sangat baik dengan skor 14,13 atau 94,19% dan untuk petani swadaya non-RSPO baik dengan skor 11,39 atau 75,93%. Penerapan prinsip 3 untuk petani swadaya RSPO adalah sangat baik dengan skor 4,50 atau 90,00 % dan petani swadaya non-RSPO kurang baik 2,46 atau 49,20 %. Penerapan prinsip prinsip 4 untuk petani swadaya RSPO adalah baik dengan skor 34,32 atau 85,80 dan petani swadaya non-RSPO baik dengan skor 29,68 atau 74,20%. Penerapan prinsip 5 untuk petani swadaya RSPO adalah sangat baik dengan skor 17,83 atau 89,17 dan untuk petani swadaya non-RSPO cukup baik dengan skor 11,08 atau 55,42%. Penerapan prinsip 6 untuk petani swadaya RSPO adalah yaitu sangat baik dengan skor 44,68 atau 89,36% dan petani swadaya non-RSPO cukup baik yaitu dengan skor 30,61 atau 61,22%. Penerapan prinsip 7 untuk petani swadaya RSPO adalah yaitu baik dengan skor 23,55 atau 78,50% dan petani swadaya non-RSPO cukup baik yaitu dengan skor 16,24 atau 54,12%. Penerapan kriteria 8.1 untuk petani swadaya RSPO dan non-RSPO sangat baik dengan skor 5,00 atau 100%.

Pemasaran TBS

Pemasaran TBS produk RSPO untuk petani kelapa sawit swadaya harus memperhatikan kemana produk RSPO akan dipasarkan. Apabila produk RSPO akan dipasarkan untuk produk makanan ke sesama anggota RSPO maka standar sertifikasi RSPO harus mengacu kepada prinsip dan kriteria RSPO. Apabila tujuan pemasaran untuk bahan baku *biofuel* di Eropa maka selain RSPO standar sertifikasi juga mengacu pada standar *International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)*.

Pemasaran TBS untuk petani swadaya RSPO dan non-RSPO yang tergabung dalam Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah dipasarkan ke Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Inti Indosawit Subur. Alur produksi dimulai dengan pemanenan TBS di kebun petani, TBS diangkut ketempat pengumpulan hasil (TPH), TBS yang telah dikumpulkan di TPH selanjutnya ditimbang oleh pengurus kelompok tani yang diawasi oleh mandor, setelah itu TBS dimuat ke armada yang selanjutnya dikirim ke PMKS. Dalam pengiriman harus didampingi oleh pengurus kelompok tani sampai ke PMKS.

Analisis Pendapatan Usahatani

(1). Biaya Tetap

a). Biaya Penyusutan Alat Pertanian

Biaya penyusutan peralatan pertanian adalah suatu biaya yang wajib diperhitungkan oleh petani sebagai investasi petani untuk membeli peralatan yang baru setelah masa pakai peralatan telah habis. penyusutan alat pertanian dihitung dengan metode garis lurus yaitu harga dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis peralatan pertanian diasumsikan sama setiap alat yaitu

lima tahun. Rata-rata biaya penyusutan alat pertanian petani swadaya RSPO adalah Rp. 343.384,62 Rata-rata biaya penyusutan peralatan pertanian petani swadaya non-RSPO adalah Rp. 281.322,03.

b). Biaya Pemupukan

Biaya pembelian pupuk dipotong tiap bulannya dari hasil produksi TBS petani oleh Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah selama satu tahun. Setiap bulannya biaya pemupukan diambil melalui potongan dari hasil panen petani. Rata-rata biaya pemupukan petani swadaya RSPO pada tahun 2013 adalah Rp. 4.720.589,74 dengan petani yang menggunakan pupuk paket A sebanyak 40 orang dan pupuk paket B sebanyak 38 orang. Sedangkan total biaya pemupukan petani swadaya non-RSPO adalah Rp. 4.217.000,00 dengan semua petani menggunakan pupuk paket B. Upah tenaga kerja untuk pemupukan pada petani swadaya RSPO yaitu untuk Tenaga Kerja Dalam Keluarga (TKDK) yaitu rata-rata Rp. 162.307,70 dan Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK) rata-rata Rp. 75.897,40. Sedangkan Upah tenaga kerja pemupukan pada petani swadaya non-RSPO untuk TKDK yaitu rata-rata Rp. 202.881,40 dan TKDK rata-rata Rp. 7118,60.

c). Biaya Pemangkasan

Pemangkasan pada petani swadaya RSPO dilakukan sekali dalam satu tahun. Dengan sistem upah pada daerah penelitian yaitu sistem borongan. Rata-rata biaya pemangkasan petani swadaya RSPO dalam satu ha adalah Rp. 404.807,69 yang berasal dari TKDK Rp. 266.666,70 dan TKLK Rp. 139.423,10. Rata-rata biaya

pemangkasan petani swadaya non-RSPO dalam satu ha adalah Rp. 490.168,49 yang berasal dari TKDK Rp. 473.389,80 dan TKLK Rp. 16.779,70.

e). Biaya Penyemprotan Gulma

Biaya pengendalian gulma dengan jasa TUS untuk petani terdiri dari biaya pembelian herbisida dan biaya operasional yang mencakup transportasi untuk pengangkutan alat dan karyawan TUS, upah tenaga kerja, kas KUD, servis dan biaya lain-lain. Besarnya biaya penyemprotan pada kebun petani tergantung pada kondisi areal kebun yang disemprot. Jika kondisi kebun penuh dengan gulma, maka biaya yang dikenakan lebih mahal, dikarenakan kebutuhan herbisida yang digunakan akan lebih banyak. Rata-rata biaya penyemprotan gulma di kebun petani swadaya RSPO adalah Rp. 522.131,42. Sedangkan petani swadaya non-RSPO rata-rata melakukan penyemprotan sendiri untuk pengendalian gulma pada kebun kelapa sawit menggunakan herbisida dengan merk dagang Ruound up dan Gramoxon. Rata-rata pembersihan gulma pada petani swadaya non-RSPO adalah Rp. 405.915,25 yang berasal dari TKDK Rp.398.796,60 dan TKLK Rp. 12.203,40.

(2). Biaya Variabel

a). Upah Panen

Upah panen merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani pada setiap kali pemanenan. Besarnya upah panen pada petani di daerah penelitian adalah Rp. 100 per kg. Upah panen dilakukan dengan sistem dipotong dari jumlah hasil produksi pada saat pemanenan dilakukan.

b). Upah Timbang TBS

Penimbangan TBS dilakukan oleh pengurus kelompok tani pada tempat pengumpulan hasil (TPH) masing-masing petani. Pada saat penimbangan juga dilakukan pengontrolan kualitas TBS dilakukan oleh pengurus kelompok tani. Upah penimbangan TBS berlaku pada daerah penelitian adalah Rp. 12 per kg. Pembayaran upah penimbangan setiap petani akan dipotong dari hasil produksi petani setiap bulannya.

c). Jasa Angkutan TBS

TBS yang telah dipanen pada kebun petani akan dipasarkan ke PMKS melalui Asosiasi Petani Swadaya Amanah. Pengangkutan TBS yang dipasarkan akan dikenakan biaya pengangkutan TBS. Biaya pengangkutan ditentukan Rp. 40 per kg dari hasil TBS kebun petani.

d). Perawatan Jalan

Biaya perawatan jalan perlu diperhitungkan untuk perawatan jalan yang dilalui oleh truk pengangkut TBS. Sarana jalan yang memadai akan memudahkan petani dalam mengangkut TBS dari kebun. Biaya perawatan jalan tergantung dari besarnya jumlah potongan pada setiap kelompok tani yang ditentukan oleh petani melalui kesepakatan bersama.

e). Jasa Kelompok Tani

Jasa kelompok tani diberikan oleh setiap anggota kelompok tani kepada ketua kelompok tani sebagai upah atau jasa kepengurusan TBS petani. Penentuan besarnya upah yang diberikan berdasarkan kesepakatan anggota. Jasa kelompok tani ini diberikan setiap bulannya kepada ketua kelompok tani.

Produksi

Tujuan yang paling utama petani dalam usahatani kelapa sawit adalah untuk mendapatkan produksi yang optimal yang akan berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh petani. Semakin besarnya jumlah produksi, maka akan besar pula jumlah pendapatan yang diperoleh petani. Produksi kelapa sawit ditentukan oleh faktor genetik kelapa sawit itu sendiri dan faktor agroteknis yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit (Hutagaol, 2010).

Faktor genetik adalah faktor jenis bibit yang digunakan oleh petani. Jika jenis bibit yang digunakan adalah bibit unggul maka produksi akan meningkat, sedangkan bibit yang tidak unggul tidak akan dapat meningkatkan produksi walaupun telah dilakukan perawatan secara maksimal. Rata-rata produksi kelapa sawit per kaplingnya untuk petani swadaya RSPO pada tahun 2013 adalah 39,22 ton. Sedangkan rata-rata produksi per kaplingnya untuk petani swadaya non-RSPO yaitu 29,21 ton.

Harga

Harga adalah suatu yang penting dalam mempengaruhi pendapatan petani. Semakin tinggi harga maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh petani. Harga kelapa sawit petani swadaya ditentukan oleh PMKS dari sampel rendeman buah petani. Rata-rata harga kelapa sawit pada tahun 2013 yang diterima petani adalah Rp. 1.366 per kg. Pada tahun 2013 harga yang diterima oleh petani swadaya RSPO dan petani swadaya non-RSPO tidak ada perbedaan harga.

3. Produktivitas dan Pendapatan

Produktivitas

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah produksi dengan luas lahan. Rata-rata produktivitas kebun kelapa sawit petani swadaya RSPO lebih tinggi dari pada produktivitas kebun kelapa sawit petani swadaya non-RSPO. Rata-rata besarnya produktivitas kebun kelapa sawit petani swadaya RSPO pada tahun 2013 adalah 17,91 ton per ha per tahun. Sedangkan rata-rata produktivitas kebun kelapa sawit petani swadaya non-RSPO adalah 16,99 ton per ha per tahun.

Hasil pengujian diketahui bahwa produktivitas kebun kelapa sawit petani sampel adalah tidak berbeda nyata secara statistik. Dari kolom uji Z untuk uji 2-sisi menunjukkan Probabilitas (sig) = 0,102 lebih besar dari $\alpha = 0,025$ yang berarti H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna antara rata-rata produktivitas petani swadaya RSPO dan non-RSPO dengan kata lain penerapan praktek GAP tidak terlalu berpengaruh nyata terhadap produktivitas kebun kelapa sawit petani.

Pendapatan

Pendapatan adalah besarnya jumlah penerimaan dikurangi dengan biaya. Rata-rata pendapatan petani sawadaya RSPO lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan petani swadaya non-RSPO. Rata-rata pendapatan petani swadaya RSPO pada tahun 2013 adalah Rp. 13.905.740,76. Sedangkan rata-rata pendapatan petani swadaya non-RSPO adalah Rp. 13.499.025,40. Dari rata-rata pendapatan petani dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani swadaya RSPO dan non-RSPO tidak ada perbedaan yang

nyata. Tidak adanya perbedaan pendapatan ini disebabkan oleh tidak adanya perbedaan harga TBS antara petani swadaya RSPO dan non-RSPO pada tahun 2013.

Hasil pengujian diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani swadaya RSPO tidak berbeda dengan rata-rata pendapatan petani swadaya non-RSPO. Dari kolom uji Z probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,025$ yang berarti H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan secara nyata antara rata-rata pendapatan petani swadaya RSPO dengan pendapatan petani swadaya non-RSPO dengan kata lain penerapan prinsip dan kriteria RSPO tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Kesimpulan

Keragaan kebun petani swadaya RSPO sudah baik dan sesuai standar. Ini terlihat pada pemeliharaan kebun yang sebagian besar petani telah menerapkan praktek budidaya terbaik. Keragaan kebun petani swadaya non-RSPO sudah cukup baik. Namun penyemprotan gulma dan pengendalian hama terpadu pada kebun petani belum sesuai standar.

Tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO pada petani swadaya RSPO berada pada kriteria sangat baik dengan rata-rata skor 151 atau 86,20%. Sedangkan tingkat penerapan prinsip dan kriteria RSPO petani swadaya non-RSPO berada pada kriteria cukup baik yaitu dengan rata-rata skor 112 atau 64,02%.

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata produktivitas kebun dan pendapatan usahatani antara petani swadaya RSPO dan petani non-RSPO. RSPO tidak mempengaruhi produktivitas

dan pendapatan usahatani secara signifikan, Namun menerapkan prinsip dan kriteria RSPO dapat menghasilkan produk kelapa sawit yang terjamin kualitasnya karena diproduksi secara lestari. Selain itu RSPO juga menjamin akses pasar bagi petani swadaya karena kelompok petani dapat membuat mitra kerja dengan PMKS.

Saran

Penerapan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani swadaya RSPO dan petani swadaya non-RSPO agar lebih ditingkatkan terutama pada pengendalian hama terpadu. Perlu dilakukan pelatihan secara terus-menerus untuk petani swadaya non-RSPO agar penerapan prinsip dan kriteria RSPO dapat maksimal dilakukan oleh petani.

Penerapan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani swadaya non-RSPO paling rendah yaitu pada Prinsip 5 Kriteria 5.1 dan 5.2 Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diberi penyuluhan kepada petani agar petani dapat mengerti tentang habitat dengan nilai konservasi tinggi dan hewan yang dilindungi yang ada disekitar kebun.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah. 2012. **Buku Pedoman Internal Control System (ICS) Petani Kelapa Sawit Swadaya periode Juli 2012–Juli 2013**. Pelalawan

Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2012. **Statistik Perkebunan Provinsi Riau 2012**. Pekanbaru

Hasan, M. Iqbal. 2012. **Pokok-Pokok Materi Statistik 2**

(Statistik Inferensif) edisi kedua. Bumi Aksara. Jakarta

Hutagaol, Brian Aristo. 2010. **Analisis Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Desa Air Terbit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru. (Tidak dipublikasikan).

KUD Bakti. 2012. **Laporan Keuangan Tahunan Koperasi Unit Desa (KUD) Bakti Tahun Buku 2012**. Pelalawan

Nazir, M. (2014). **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia. Bogor

Shadbolt, Nicola dan Sandra Martin. 2005. **Farm Management in New Zealand**. Oxford University Press. Australia

Soekartawi. 1995. **Analisis Usaha Tani**. Universitas Indonesia Press. Jakarta

Widjojo, Noverica. 2013. **Pertama di Indonesia, Petani Sawit Swadaya Menerima Sertifikasi RSPO**. [http : // www . wwf . or . id / ? 29120 / Pertama – di – Indonesia – Petani – Sawit – Swadaya – Terima – Sertifikasi - RSPO](http://www.wwf.or.id/?29120/Pertama-di-Indonesia-Petani-Sawit-Swadaya-Terima-Sertifikasi-RSPO) diakses tanggal 5 Oktober 2013